

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro Kecil Menengah atau biasa disebut UMKM yaitu program ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan tanpa menganak pada badan perusahaan lain. Secara umum UMKM memiliki ciri manajemen yang berdiri sendiri, memiliki modal sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah pekerja yang dimiliki terbatas. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang memiliki kriteria aset: Maksimal Rp 50 Juta, kriteria omset : Maksimal Rp 300 juta rupiah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang memiliki kriteria aset : Rp 50 juta – Rp 500 juta, kriteria omset : Rp 300 juta – Rp 2,5 Miliar rupiah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini memiliki kriteria asset : 500 juta – Rp 10 Miliar, kriteria omset : >Rp 2,5 Miliar – Rp 50 Miliar rupiah.

Salah satu yang menjalankan program UMKM yaitu kabupaten Kudus. Kudus sebagai salah satu kawasan perdagangan di pulau Jawa juga berpotensi menjadi pusat perdagangan berskala internasional. Keunggulan Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten yang proinvestasi di Jawa Tengah juga dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Kudus sebagai Kabupaten/ Kota Proinvestasi peringkat IV di Jawa Tengah. Padahal dari sisi luas wilayahnya Kabupaten Kudus dianggap kabupaten paling kecil di Jawa Tengah dengan luas wilayahhanya 42.516 hektare. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus ini dari hasil survei penduduk tahun 2012 adalah 791.891 orang terdiri atas 391.722 laki-laki dan 400.169 perempuan.

Pasal 33 UU No. 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengembangan daya saing UMKM merupakan bagian dari kegiatan perekonomian nasional. Berikut dasar peraturan perundang-undangan untuk pengembangan daya saing :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan.
5. Efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB (produk domestik regional bruto). Sektor industri pengelolaan berperan amat dominan dalam perekonomian Kabupaten Kudus. Kontribusi sektor ini bagi PDBRB Kabupaten Kudus sebesar 58,89 persen. Indikator pendapatan penduduk dapat dilihat melalui besarnya pendapatan regional pendapatan perkapita penduduk. Dengan semakin besarnya PDRB suatu daerah diharapkan pendapatan penduduk daerah akan bertambah tinggi. Secara umum pola perekonomian di Kabupaten Kudus untuk 2014 tidak jauh dari tahun-tahun sebelumnya dimana sektor perdagangan, hotel, restoran sebagai penyumbang kedua setelah sektor industri, diikuti sector pertanian.

Jumlah perusahaan di kabupaten Kudus termasuk UMKM mencapai 13.482 dengan kosentrasi bidang usaha yang berbeda-beda. Dilihat dari jenis industrinya, terdapat tiga jenis industri andalan daerah ini, yaitu industri

tembakau, industri percetakan, penerbitan, dan kertas, dan industri makanan dan minuman.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus bidang Koperasi dan UKM merupakan instansi pemerintah dalam menangani usaha mikro kecil dan menengah. Dalam melakukan pengembangan UMKM sesuai dengan implementasi kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan UMKM, Disnakerperinkopukm bidang Koperasi dan UKM membuat rencana kegiatan dan program guna melakukan kegiatan pengembangan UMKM yang telah disusun pada RENSTRA dinas bidang UKM sebagai berikut :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
 - a. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah.
 - b. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
 - a. Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - b. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .
 - a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.
 - b. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a. Pendidikan dan pelatihan formal

Rencana kegiatan dan program yang sudah disusun dalam renstra tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pengembangan UMKM yang memang saat ini sangat dibutuhkan oleh UMKM di Kabupaten Kudus guna tercapainya UMKM yang berdaya saing dan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui UMKM.

Pelaksanaan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus sudah dilakukan semenjak di berlakukannya Undang-undang yang menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan kegiatan perekonomian nasional dan harus dijalankan disetiap daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kudus membuat kebijakan tentang pemberdayaan UMKM. Kegiatan ini dilakukan guna untuk tercapainya UMKM yang berdaya saing dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui UMKM. Dalam melakukan kegiatan pengembangan UMKM ini pemerintah Kabupaten Kudus melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Selain melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan UMKM ini, pemerintah Kabupaten Kudus berperan dalam kepengurusan permodalan dan kepengurusan legalisasi usaha. Kegiatan-kegiatan pengembangan UMKM yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus ini telah disesuaikan dengan rencan program dan kegiatan yang sudah disusun pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM bidang Koperasi dan UKM yang sudah dijelaskan diatas.

Semakin banyaknya UMKM yang setiap tahunnya meningkat dan jumlah pegawai yang terbatas membuat banyaknya UMKM yang ada di Kabupaten Kudus tidak terdaftar dan masih banyak UMKM yang belum ikut serta dalam program pengembangan yang dilakukann oleh Disnakerperinkop. Untuk itu, dalam pelaksanaan pengembangan UMKM terhambat karena masih banyaknya UMKM yang tercakup oleh pemerintah Kabupaten Kudus.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus

No	Kemacatan	Jumlah	Terdaftar
1.	Gebog	1.440	765
2.	Kota	2.503	1.576
3.	Bae	1.199	564
4.	Jati	1.741	1.119
5.	Jekolo	1.665	903
6.	Kaliwungu	1.769	682
7.	Undaan	1.579	477
8.	Dawe	1.503	745
9.	Mejobo	516	245
		13.915	7.076

Sumber : Disnakerperinkopukm Kudus

Permasalahan terjadi dalam UMKM di Kabupaten Kudus yaitu masih banyaknya UMKM yang belum terdaftar dalam program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Hal ini membuat pemerintah terkendala dalam melakukan pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus, karena jumlah hanya setengah dari jumlah keseluruhan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus, dan masih banyak UMKM yang tidak dalam kendali pemerintah setempat.

Dengan demikian untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengembangan UMKM di Kabupaten Kudus sudah terlaksana dengan baik atau belum baik, maka di perlukannya penelitian lebih lanjut tentang melihat bagaimana pelaksanaan pengembangan program usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan 5 penelitian yang sudah dilakukan yang terkait pelaksanaan program UMKM sebagai berikut :

No	Judul	Nama	Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan
1.	Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang	Dani Danuar Tri Utami.	Penelitian ini melihat sejauhmana dalam melakukan pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif di kota Semarang, dari hasil penelitian ini yaitu UMKM belum dapat dijadikan penopang utama prekonomian di Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan industri besar lebih mendominasi di kota ini. UMKM kreatif di Kota Semarang memiliki kemampuan yang terbatas serta mengalami permasalahan dalam pengembangan usahanya.	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan teori ekonomi kreatif dan teori ekonomi biaya transaksi.

2.	Implementasi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo	Irawati Abdul	<p>Penelitian ini melihat dari sisi kelembagaan yang ada pada UMKM di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik yang diakibatkan oleh aspek kelembagaan yang belum tertata dengan baik. Hal ini merupakan tantangan pada semua pihak terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mengharuskan keberadaan kelembagaan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong daya saing suatu</p>	<p>Menggunakan metode diskriptif kualitatif. Menggunakan teori implementasi dan kelembagaan.</p>
----	---	---------------	---	--

			usaha.	
3.	Peningkatan Daya Saing UMKM Jawa Barat Dalam Menopang Perekonomian Nasional Menghadapi Persaingan Global	Prof Ina Primiana	Penelitian ini berfokus pada peningkatan daya saing hasil produksi UMKM yang ada di Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penghambat dalam melakukan peningkatan daya saing UMKM di Jawa Barat yaitu memiliki persoalan utama yang dihadapi yaitu : kelemahan internal UMKM, pada institusi pembina UMKM, keterbatasan UMKM, daya ungkit budaya perusahaan, inkonsistensi kualitas.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan teori Supply Chain.
4.	Faktor penghambat	Wiwiek Rabiatul	Pada penelitian ini melihat faktor-faktor	Menggunakan metode

	pertumbuhan usaha mikro kecil menengah studi di Kabupaten Banyumas	Adawiyah	yang menjadi penghambat pertumbuhan UMKM di Kabupaten Banyumas. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya faktor penghambat dalam pertumbuhan UMKM di Kabupaten Banyumas yaitu faktor internal dan eksternal. Berdasarkan tingkat kepentingannya faktor-faktor dukungan financial merupakan salah satu faktor utama yang menentukan perkembangan usaha.	kuantitatif dan menggunakan teori Theory of planned behavior dan usaha kecil dan peluang kerja.
5.	Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Memperkuat Cadangan Devisa Negara	H.A Suprpto	Kontribusi UKM dalam kegiatan ekspor masih relatif rendah dibandingkan dengan usaha besar dengan rasio 1:4, di mana sebagian besar bertumpu pada	Metode penelitian kuantitatif dan menggunakan teori Kinerja UKM dalam

	melalui Ekspor		produk kerajinan dan barang seni, garmen, serta makanan dan minuman;	Kegiatan Ekspor
--	-------------------	--	---	-----------------

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan terkait dengan pelaksanaan pengembangan program usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kudus yaitu :

Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pengembangan program UMKM di Kabupaten Kudus dengan adanya program UMKM yang sudah ada ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah, Mengetahui Pelaksanaan Pengembangan Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Kudus sudah terlaksana sesuai sasaran/ efektif atau belum efektif.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai efektivitas pelaksanaan pengembangan Usaha Mikro Kecilo Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus.

2. Bagi Universitas

Memperkaya koleksi penelitian ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian ilmiah selanjutnya yang terkait dengan topik atau judul penelitian ini.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pihak-pihak Terkait

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus khususnya pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Kabupaten Kudus.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang akan memulai usaha mikro kecil menengah dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tidak takut untuk berwirausaha.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.5.1 Konsep Administrasi Publik

A. Beberapa definisi menurut para ahli, antara lain :

Administrasi publik merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang objek materialnya adalah negara, yaitu antara ilmu politik, ilmu pemerintahan, hukum tata negara maupun ilmu sosial lainnya. Menurut Edward H. Litchfield dalam (Syafie, 2010:25) . Administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai dan digerakkan, serta dipimpin. Selain itu, Administrasi publik juga menekankan bahwa bagaimana suatu organisasi pemerintah, bagaimana kepemimpinannya dan bagaimana suatu organisasi tersebut akan digerakkan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam (Syafie, 2010:24) Administrasi publik adalah administrasi negara sebagai organisasi, dan administrasi yang

mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Sejalan dengan pendapat Prajudi Atmosudirdjo mengenai Administrasi publik, Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008:3) mengemukakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Woodrow Wilson dalam (Syafii, 2012:21) juga menyatakan bahwa Administrasi publik adalah urusan atau praktik mengenai urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan diharapkan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Selain itu, pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh sektor privat atau swasta.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Administrasi publik merupakan studi mengenai bagaimana suatu organisasi pemerintah dapat melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan terkait dengan publik yaitu memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan

publik serta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta.

B. Perkembangan Administrasi Publik

Sebagai ilmu Administrasi Publik memerlukan perkembangan dengan menggali konsep baru berdasarkan kepentingan masyarakat sesuai dengan perubahan perilaku masyarakat. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu dalam pemikiran dan pemecahan masalahnya menjadi bersifat ilmu pengetahuan multidisiplin dan interdisiplin. Dalam berkembang ilmu pengetahuan Administrasi Publik telah tumbuh dan di kenal dengan sejumlah “paradigma” yang menggambarkan perkembangan dan perubahan dalam tujuan, teori dan metodologi atau dalam bangunan epistemologi serta nilai yang mendasarinya.

Ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang paradigma administrasi publik, diantaranya adalah : Nicholas Henry (1975). Nicholas Henry memusatkan pengamatannya atas “lokus dan fokus” dari ilmu administrasi. Kelima paradigma menurut Nicholas Henry adalah (Sedarmayanti. 2010:7) :

1. Dikotomi antara politik dan Administrasi (1900-1927)

Tokoh-tokoh dari paradigma ini : Frank J. Goodnow dan Leonard D. White

Goodnow dalam tulisannya yang berjudul “political and Administration 1900” pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda :

- a. Fungsi Politik harus memusatkan perhatiannya dalam membuat kebijakan/ ekspresi dari kehendak rakyat.
- b. Fungsi administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan implementasi dari suatu kebijakan atau kehendak tersebut. Badan yudikatif membantu legislatif untuk menentukan tujuan atau merumuskan kebijaksanaan, sedangkan eksekutif secara terpisah dan A Politis melaksanakan kebijakan.

2. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Tokoh-tokoh yang terkenal dalam paradigma ini adalah : Wiloughly dan Gullick and Verwick

Yang sangat dipengaruhi tokoh-tokoh manajemen kalsik seperti Fayol dan Taylor, mereka memperkenalkan prinsip administrasi sebagai focus administrasi publik, focus itu dituangkan dalam apa yang disebut; planning, organizing, staffing, directing, coordinating, budgeting yang menurut mereka bersifat universal. Sedangkan lokusnya tidak pernah diungkapkan, karena merka beranggapan bahwa prinsip administrasi dapat diterapkan dimana saja termasuk organisasi pemerintah.

3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Morstein dan Mark adalah sebagai editor buku yang berjudul “The Elemen Of Publik Administration 1946” mempertanyakan pemisahan politik dengan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin. Karena administrasi lahir dari kadungan ilmu politik maka pendekatan-pendekatan administrasi di pengaruhi ilmu politik.

Herbert Simon menerapkan kritik terhadap ketidakonsistenan prinsip administrasi, menilai prinsip administrasi tidak berlaku universal, dalam konteks administrasi bukanlah tidak bebas nilai berlaku dimana saja tetapi justru dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Akibatnya munculnya paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya ada pada birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip administrasi yang banyak kelemahan.

4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Dalam oaradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah dipopulerkan sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam, perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisa sistem, riset operasi dan sebagai merupakan fokus dari paradigma ini.

Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini:

1. Berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologis sosial
2. Berorientasi pada kebijaksanaan publik, semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis akan tetapi dalam dunia administrasi publik, karena itu locusnya menjadi tidak jelas.

5. Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-Sekarang)

- a. Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas

- b. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori manajemen dan kebijakan publik
- c. Lokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah masalah-masalah dan kepentingan publik, urusan publik, dan kebijakan publik.

Selanjutnya G. Federickson (1976) memunculkan paradigma dengan nama lain yaitu : birokrasi klasik, birokrasi neoklasik, kelembagaan, hubungan kemanusiaan, pilihan publik, dan administrasi negara (publik) baru. Dalam paradigma administrasi negara (publik) baru kemudian dikembangkan berbagai hal yang dapat dijadikan dasar paradigma administrasi negara (publik) sesuai dengan pilihan pendekatan dan permasalahan konkrit yang dihadapi. Perkembangan paradigma ini dibedakan menjadi : struktural fungsional, perilaku, sistemik dan kebijakan publik. (Mustopadidjaja AR, 1985, Soemardi Reksopoetranto, 1987)

Paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik memiliki fokus dan lokus yang jelas, yaitu berfokus pada teori organisasi publik, manajemen publik, dan kebijakan publik, dengan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan yang berada di ranah publik.

Adanya siklus pengelolaan kebijakan publik, maka muncul paradigma kebijakan publik yang memfokuskan perhatian dan analisisnya pada keseluruhan substansi dan proses kebijakan, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian kinerja yang harus dilakukan sistem administrasi publik. Lokus paradigma ini adalah sistem administrasi publik (organisasi dan manajemen pemerintahan) dalam berbagai unsur, satuan,

posisi, peran, dan dinamikanya dalam mengemban tugas dan tanggungjawab sesuai amanat konstitusi dan undang-undang negara. (Sedarmayanti. 2010:17)

Dalam beberapa tahun terakhir berkembang paradigma baru, antara lain pandangan yang mengarah pada administrasi publik yang difokuskan untuk menghasilkan “*high quality public good and services*”. Untuk itu diperlukan birokrasi yang memiliki semangat kewirausahaan. Menurut David Osborne dan Ted Gaebler (1992) dalam bukunya “*Reinventing Government*” terdapat sepuluh prinsip yang merupakan komponen paradigma baru yang mengandung perubahan visi, misi, dan strategi administrasi publik untuk disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis, yaitu :

a. *Steering rather than rowing*

Pemerintah berperan sebagai katalisator, yang melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber yang ada dimasyarakat. Dengan demikian pemerintah mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai kepentingan publik.

b. *Empower communities to solve their own problem, rather than merely deliver services.*

Pemerintah harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanannya. Organisasi kemasyarakatan seperti: koperasi, LSM dan sebagainya, perlu diajarkan untuk memecahkan permasalahannya sendiri antara lain masalah : keamanan, kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman mural dan lain-lain.

- c. *Promote and encourage competition rather than monopolies*

Pemerintah harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan.

- d. *Be driven by mission rather than rules*

Pemerintah harus melakukan aktivitas yang menekan kepada pencapaian apa yang merupakan “misinya” daripada menekankan pada peraturan-peraturan.

- e. *Result oriented by funding outcomes rather than outputs*

Pemerintah hendaknya berorientasi kepada kinerja yang baik.

- f. *Meet the needs of the customer rather than of the bureaucracy*

Pemerintah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan birokrat.

- g. *Concentrate on earning money rather than just spending it.*

Pemerintah yang baik memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan yang untuk organisasinya, disamping pandai menghemat biaya.

- h. *Invest in preventing problems rather than curing crises.*

Pemerintah yang antisipatif, lebih baik mencegah daripada menanggulangi.

- i. *Decentralize authority rather than build hierarchy.*

Desentralisasi pemerintah, dan berorientasi hierarki menjadi partisipatif dengan pengembangan kerjasama tim.

- j. *Solve problem by influencing market forces rather than by treating public programs.* Pemerintah harus memperhatikan kekuatan pasar.

Pasokan didasarkan kepada kebutuhan atau permintaan pasar dan bukan sebaliknya.

Paradigma berikut dikenal dengan *New Public Management* yang melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberi pelayanan publik, termasuk membangun masyarakat. Paradigma ini dikenal dengan *Banishing Bureaucracy* (memangkas birokrasi), sebagai operasionalisasi dari *Reinventing Government* diutarakan oleh Osborne and Plastrik (1997) yang mengemukakan makna mewirausahakan/ reiventing, sebagai transformasi fundamental terhadap sistem dan organisasi publik untuk menciptakan peningkatan secara menakjubkan dalam efektivitas, efesiensi, adaptabilitas, dan kapasitasnya untuk berorientasi.

Perbedaan antara *Reinventing Government* (RG) dengan *Banishing Bureaucracy* (BB) adalah: RG memainkan reinvensi dengan karakteristik manajemen pemerintah yang berorientasi wirausaha secara deskriptif, sedangkan BB bersifat prespektif membahas cara penciptaan strategi untuk mentransformasikan sistem dari organisasi birokrasi ke organisasi wirausaha, dengan memberikan bagaimana untuk aplikasinya. Dalam rangka kebijakan publik, karena sifatnya “politis” dan merupakan kegiatan dalam rangka pembentukan kebijakan pemerintahan, maka secara utuh *policy analysis* juga mengkaji *fisibilitas politic* dari sejumlah alternatif kebijakan tertentu dan memerlukan pendalaman pengetahuan tentang “sistem, struktur, proses, dan perilaku sosial politik dalam pengambilan

keputusan” atau kegiatan lain, dalam sesuatu atau keseluruhan tahap proses kebijakan.

Hood Vigoda (2003), mengutarakan tujuh komponen doktrin dalam *NewPublic Management*, yaitu:

1. Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik,
2. Penggunaan indikator kinerja,
3. Penekanan yang lebih besar pada kontrol keluaran,
4. Pergeseran perhatian ke unit yang lebih kecil,
5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi,
6. Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen,
7. Penekanan disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumberdaya.

New Public Management dipandang sebagai pendekatan dalam administrasi publik menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari dunia manajemen bisnis dan disiplin lain untuk memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. *New Public Management* telah mengalami berbagai perubahan orientasi:

1. Orientasi pertama: *the efficiency drive*, mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
2. Orientasi kedua: *downsizing and decentralization*, mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi cepat dan tepat.

3. Orientasi ketiga: *in search of excellence*, mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Orientasi keempat: *public service orientation*, menekankan pada kualitas, misi dan nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberi perhatian lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi “user” dan warga masyarakat, memberi otoritas lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat, termasuk wakil mereka, menekankan *societal learning* dalam pemberian pelayanan publik, dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas (Ferlie, Ashburner, Fitzgerald, Pettigrew, 1997).

Tahun 2003, paradigma baru *The New Public Service* oleh J.V. Dendhart dan R.B. Dendhart (2003), menyarankan meninggalkan prinsip administrasi klasik dan *Reinventing Government* atau *New Public Management*, beralih ke prinsip *New Public Service*, administrasi publik harus:

1. Melayani warga masyarakat, bukan pelanggan.
2. Mengutamakan kepentingan publik.
3. Lebih menghargai warga negara dari pada kewirausahaan.
4. Berpikir strategis, dan bertindak demokratis.
5. Menyadari akuntabilitas bukan merupakan hal mudah.
6. Melayani dari pada menendalikan.
7. Menghargai orang, bukan hanya produktivitas.

Tabel 1.2
Perbedaan OPA, NPM dan NPS

Aspek	Old Public Administration	New Public Management	New Public Service
Dasar teoritis dan fondasi epistemologi	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi
Rasionalitas dan model perilaku Manusia	Rasionalitas Synoptic (administrative man)	Teknis dan rasionalitas ekonomi (economic man)	Rasionalitas strategis atau rasionalitas formal (politik, ekonomi dan organisasi)
Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai
Responsivitas birokrasi publik	Clients dan constituent	Customer	Citizen's
Peran pemerintah	Rowing	Steering	Serving
Pencapaian tujuan	Badan pemerintah	Organisasi privat dan nonprofit	Koalisi antarorganisasi publik, nonprofit dan privat
Akuntabilitas	Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas	Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)	Multiaspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional
Diskresi administrasi	Diskresi terbatas	Diskresi diberikan secara luas	Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung-jawab
Struktur organisasi	Birokratik yang ditandai dengan otoritas top-down	Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen	Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator	Gaji dan keuntungan, Proteksi	Semangat entrepreneur	Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat

Sumber Dendhart & Dendhart 2003

Perkembangan administrasi publik telah digambarkan secara garis besar dengan jelas, memiliki fokus dan lokus jelas, berfokus pada teori organisasi, manajemen dan kebijakan publik, dan lokusnya masalah dan kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti memiliki dasar untuk melakukan penelitiannya tentang efektivitas pelaksanaan pengembangan program usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Kudus. Pelaksanaan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus merupakan salah satu fokus dari Ilmu Administrasi Publik, karena disini melihat bagaimana pemerintah Kabupaten Kudus beserta Disnakerperinkopukm Kudus dalam melayani pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kudus dengan melakukan kegiatan pengembangan UMKM yang diharapkan mampu menjadikan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus berdaya saing. Untuk melihat apakah pelaksanaan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan fektif maka diperlukannya penelitian tentang efektivitas pelaksanaan pengembangan UMKM di Kabupaten Kudus. Mengenai penelitian ini peneliti memiliki landasan teori yaitu landasan yang mendasari, yaitu *New Public Service* pada prinsip : 1. Melayani warga masyarakat bukan pelanggan, dimana pemerintah harus melayani warga masyarakat khususnya pelaku umkm. 2. Mengutamakan kepentingan publik, dimana dalam konteks ini pemerintah dituntu untuk memberdayaan program umkm yang ada di Indonesia. 3. Berpikir strategis, dan bertindak demokratis, dimana pemerintah harus berfikir stategis dalam menentukan suatu tindakan untuk pencapaian suatu tujuan.

1.5.2 Kebijakan Publik

Sebetulnya istilah kebijakan publik sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, namun pada dasarnya banyak sekali definisi mengenai istilah ini. Beraneka ragam istilah kebijakan publik seperti yang dirangkum Budi Winarno (2013 : 20 - 23) yaitu : Robert Eyestone kebijakan publik secara luas adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya, konsep ini dipandang sangat luas dan kurang pasti karena mencakup banyak sekali hal. Sementara menurut Thomas R. Dye “ kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan “. Richard Rose mengartikan bahwa kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri. Cald Friedrich mengartikan bahwa kebijakan dipandang sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap kebijakn yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran atau maksud tertentu. Menurut James E. Anderson kebijakan merupakan tindakan yang ditentukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor untuk mengatasi suatu persoalan tertentu.

Jones (dalam Sri Suwitri 2011 : 6) definisi kebijakan yang dikemukakan pakar memang banyak namun tidak sulit untuk mengambil benang merahnya, karena kata kebijakan sering sekali ditemui dalam percakapan sehari-hari dan

sering dipertukarkan maknanya dengan tujuan, program, keputusan, hukum, patokan, *grand design*.

Menurut Anderson (dalam Winarno 2013 : 23-26) konsep kebijakan publik memiliki beberapa implikasi :

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik orientasinya adalah pada tujuan dan maksud, bukan perilaku. Kebijakan publik tidak terjadi begitu saja namun di rencanakan oleh aktor- aktor dalam sistem politi.
2. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan- keputusan yang tersendiri. Tidak hanya keputusan tentang undang- undang namun juga pelaksanaannya.
3. Kebijakan merupakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang di inginkan oleh pemerintah.
4. Kebijakan publik mungkin bersifat positif dan negatif. Positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi sesuatu, negatif dalam arti kebijakan bisa saja mencakup keputusan pemerintah tetapi tidak untuk mengambil tindakan atau melakukan sesuatu, atau artinya pemerintah dapat mengambil keputusan untuk tidak mencampuri sutu bidang umum maupun khusus.

Kata publik berasal dari bahasa inggris yakni *public*. Dalam arti sebenarnya adalah “ umum “, “ masyarakat, dan “ negara” , penggunaanya berbeda dalam kata kata tertentu. Untuk pendefinisian sebagai “umum” misalnya dipakai dalam kata *public offering* (penawaran umum), *public utility* (perusahaan umum).

Yang didefinisikan sebagai kata “ masyarakat” misalnya, *public service* (pelayanan masyarakat), *public opinion* (opini masyarakat), *public interest* (kepentingan masyarakat). Dalam kata “ negara “ misalnya, *public authorities* (otoritas negara), *public building* (bangunan negara), *public finance* (keuangan negara). Kata publik secara umum artinya adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir perasaan, sikap, harapan, tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai dan norma yang mereka miliki. (Syafiie, 2006 : 17-20)

Administrasi publik melayani publik dan dalam pelayanan tersebut birokrasi pemerintahan menerapkan berbagai disiplin, dari sisnilah intervensi publik muncul, intervensi publik dalam hal ini diartikan sebagai intervensi dari pemerintah sehingga publik diartkan sebagai *social convention* (pertemuan yang memerintah) dan *master place situations* (penempatan pada proporsinya).

Irfan Islamy (Sri Suwitri,2011:9) mengumpulkan beberapa pengertian mengenai kebijakan publik seperti berikut ini :

1. Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat Thomas ini hampir senada dengan pendapat Goerge C. Edward III dan Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat di lakukan pemerintah dalam bentuk undang-undang, *statement*, yang kemudian ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

2. Pandangan bahwa kebijakan publik adalah rancangan program- program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan dikemukakan oleh James E. Anderson dan George C. Edward III dan Ira Sharkansky. Anderson mengartikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan- badan dan pejabat- pejabat pemerintah. Sementara George C. Edward III dan Ira Sharkansky memandang bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program- program pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
3. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memiliki pandangan yang senada dengan David Easton mereka memandang kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan yakni sebagai suatu program pencapaian tujuan nilai- nilai dan praktek- praktek yang terarah. Sementara David Easton mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai- nilai secara paksa yang sah kepada seluruh anggota masyarakat.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2013 : 32) studi kebijakan publik telah terangkum dalam lingkaran kebijakan publik atau tahap- tahap kebijakan publik. Dengan ini maka wilayah kajian kebijakan publik sangatlah luas dan tidak hanya terpaku pada lembaga- lembaga formal saja seperti ilmu politik tradisional. Tetapi bila merujuk pada tahap- tahap yang dikemukakan oleh Jones dan beberapa ahli lain, domain kebijakan publik meliputi : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan penilaian kebijakan.

Pelaksanaan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus ini mengacu pada kebijakan pemerintah pusat pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah yang dimana isinya menyebutkan bahwa kegiatan pemberdayaan UMKM merupakan kegiatan ekonomi nasional dan pemerintah daerah memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan UMKM yang ada pada suatu daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kudus membuat kebijakan dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus, dengan tujuan UMKM mampu berdaya saing. Untuk itu, Kabupaten Kudus khususnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus melakukan kegiatan pengembangan UMKM. Selain itu juga Disnakerperinkopukm Kudus sebelum melakukan kegiatan pengembangan terlebih dahulu menyusun rencana program dan kegiatan untuk tercapainya pelaksanaan pengembangan, dan rencana program dan kegiatan tersebut tersusun dalam Renstra Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus. Selanjutnya untuk melakukan kegiatan pengembangan UMKM Kabupaten Kudus mengacu pada kedua kebijakan tersebut.

1.5.2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Sebaik-baik nya suatu kebijakan adalah kebijakan yang dapat di implementasikan, oleh karena itu dalam suatu penyelesaian permasalahan dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan menjadi suatu hal yang sangat penting. Secara luas yang implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan undang-undang, dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program-

program (Winarno, 2013 : 147). Implementasi dapat juga diartikan sebagai keluaran tentang sejauhmana tujuan yang telah direncanakan tersebut mendapat dukungan berupa dana.

Ripley dan Franklin (Winarno, 2013 : 148) mengartikan implementasi merupakan apa yang terjadi setelah suatu undang-undang itu ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Menurut mereka, implementasi mencakup beberapa kegiatan. *Pertama*, badan-badan yang melaksanakan undang-undang harus mendapat sumber-sumber yang dibutuhkan supaya implementasi berjalan dengan lancar. *Kedua*, badan-badan tersebut menerjemahkan anggaran menjadi langkah kongkret, rencana-rencana maupun program. *Ketiga*, badan-badan tersebut harus mengorganisasikan kegiatan mereka dengan membentuk unit-unit birokrasi dan kegiatan untuk mengatasi beban kerja. *Keempat*, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan pada para pelanggan atau kelompok target, mereka juga memberikan pelayanan atau apapun yang terkait dengan keluaran nyata mengenai suatu program.

Grindle (Winarno, 2013 : 149) menyatakan bahwa kegiatan utama implementasi adalah membentuk suatu kaitan agar memudahkan tujuan kebijakan untuk direalisasikan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah, sementara Van Meter dan Van Horn membatasi Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah, maupun swasta untuk mencapai tujuan dalam keputusan-keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan-

tindakan tersebut terdiri dari dari usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu ataupun dalam rangka melanjutkan usaha mencapai perubahan yang besar maupun kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan terjadi hanya ketika undang-undang telah ditetapkan dan dana untuk melaksanakannya telah disediakan.

A. Model Implementasi Kebijakan Publik

1. Model Implementasi Merilee S. Grindle (dalam Suwitri, 2011:86)

Grindle mengemukakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh dua variabel pokok, yakni variabel konten dan variabel konteks. Variabel konten merupakan isi dalam suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan tersebut, variabel konteks meliputi lingkungan dari kebijakan publik yakni lingkungan politik dan administratif yang memiliki kaitan dengan kebijakan publik tersebut.

Variabel konten kemudian dibagi lagi menjadi 6 unsur, yakni :

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi.

Theodore Lowi mengungkapkan bahwa jenis kebijakan publik yang dibuat akan memberi suatu dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik, bila kebijakan itu dibuat untuk perubahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, akan memunculkan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam oleh kebijakan tersebut.

2. Jenis manfaat yang di peroleh.

Program yang memberikan manfaat bagi orang banyak akan lebih mudah di implementasikan dan mendapat banyak dukungan dari kelompok sasaran, sebaliknya program yang sifatnya partikularistik akan memiliki kemungkinan menimbulkan konflik.

3. Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan.

Program yang sifatnya jangka panjang yang menuntut perubahan perilaku masyarakat cenderung lebih sulit untuk di implementasikan

4. Kedudukan pengambil keputusan.

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun secara organisatoris. Mengakibatkan lebih sulitnya proses implementasi program. Hal ini dikarenakan semakin banyak pengambil keputusan yang terlibat.

5. Pelaksana- pelaksana Program

Kemampuan dari pelaksana- pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

6. Sumber- sumber yang dapat disediakan

Sumber-sumber yang tersedia secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik.

Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh variabel konteks, yang dirinci lagi menjadi 3 unsur :

1. Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor- aktor yang terlibat.

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan, apabila sebuah kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi

2. Karakteristik rezim dan institusi

Strategi dalam menyelesaikan sebuah konflik secara tidak langsung menunjukkan ciri-ciri dari rezim yang sedang berkuasa tepat dimana implementasi dilakukan. Apakah program berada di lingkungan otoriter atau demokratis.

3. Kesadaran dan sifat responsif

Supaya tujuan suatu program dalam lingkungan khusus bisa tercapai, maka para implementor harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan *beneficiaries*.

2. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam AG. Subarsono (2010: 94), implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga variable, yaitu :

a. Karakteristik masalah :

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, ada masalah sosial yang sulit dipecahkan, ada yang mudah dipecahkan.
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, i suatu program relatif mudah diimplementasikan jikasasarannya homogen. Jika kelompok

sasaran adalah heterogen, maka implementasi program akan lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota terhadap program relatif berbeda.

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, sebuah program relatif sulit di implementasikan jika sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, akan relatif lebih mudah jika jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
 4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan, sebuah program yang tujuannya memberi pengetahuan atau memiliki sifat kognitif lebih mudah diimplementasikan daripada yang bertujuan untuk mengubah sifat dan perilaku masyarakat
- b. Karakteristik kebijakan :
1. Kejelasan isi kebijakan, ini berarti bahwa makin jelas suatu kebijakan maka akan memudahkan pelaksana untuk memahami dan melakukannya.
 2. Seberapa jauh kebijakan tersebut mempunyai dukungan teoritis
 3. Besarnya sumber daya financial bagi kebijakan tersebut dalam hal ini mengenai sumber daya keuangan dan staff
 4. Hubungan serta dukungan antar organisasi pelaksana.
 5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada Implementor.
 6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dalam hal melaksanakan pekerjaan dan program.

7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar yaitu masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

c. Variabel Lingkungan:

1. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi masyarakat yang sudah terbuka lebih mudah menerima program-program pembaruan di banding masyarakat yang masih tertutup dan tradisional dan kemajuan teknologi akan membantu dalam keberhasilan proses implementasi program, karena program tersebut dapat disosialisasikan dengan teknologi modern.
 2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, kebijakan yang bersifat insentif biasanya mudah mendapat dukungan public. Sebaliknya yang bersifat dis-insentif akan kurang mendapat dukungan publik
 3. Sikap dari kelompok pemilih
 4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan adalah variabel yang paling penting.
3. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (dalam Winarno, 2013 : 177-206)

Dalam mengkaji implementasi Edwards memulainya dengan mengajukan pertanyaan, yakni : prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang menyebabkan sebuah implementasi itu gagal. Edwards menjawab dua

pertanyaan tadi dengan menggunakan empat variabel yang krusial dalam implementasi kebijakan publik yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Edwards menyatakan bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan implementasi yang efektif adalah bahwa orang yang melaksanakan kebijakan tersebut harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus dilakukan secara akurat sehingga dapat dimengerti oleh pelaksana.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang krusial dalam implementasi suatu kebijakan, karena walaupun komunikasi berjalan dengan lancar tetapi para pelaksana kekurangan sumber-sumber, maka implementasi tidak akan efektif. Tanpa sumberdaya suatu kebijakan hanya akan menjadi rencana saja tanpa pernah bisa direalisasikan. Menurut Edwards sumberdaya implementasi terdiri dari staff, wewenang dan fasilitas.

c. Disposisi

Kecenderungan atau disposisi memiliki kosekuensi yang penting bagi berlangsungnya suatu kebijakan. Menurut Edwards watak dan karakteristik implementor yang mempengaruhi implementas sebuah kebijakan adalah meliputi komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. (Winarno, 2013: 197).

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Sebenarnya para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya namun dalam menjalankannya masih dihambat oleh struktur birokrasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards ada dua karakteristik utama birokrasi, yaitu *Standard Operating Sistem* (SOP) dan Fragmentasi. (Winarno, 2013 : 206)

4. Model Implementasi Kebijakan Publik Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut meter dan horn dalam AG. Subarsono (2010: 99), ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga kemudian dapat direalisasikan atau dilaksanakan, bila standar serta sasaran kebijakan tidak jelas atau kabur, maka akan mengakibatkan multiinterpretasi dan mudah memunculkan konflik diantara para agen implementasi
2. Sumber daya. Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang tak kalah penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Di dalam implementasi suatu kebijakan Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia maupun non manusia

3. Hubungan antar Organisasi. Di dalam melaksanakan berbagai macam program dan kebijakan, diperlukan dukungan dan koordinasi yang baik dengan instansi atau lembaga lain, sehingga koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program sangat dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan kebijakan.
4. Karakteristik agen pelaksana. Yakni mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi, yang kemudian akan memengaruhi implementasi suatu program atau kebijakan.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Bagaimana kelompok – kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan, karakter para partisipan yang mendukung atau menolak, dan bagaimana sifat dan opini publik yang ada di lingkungan terhadap kebijakan tersebut dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor/ sikap para pelaksana. Sikap para pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh dari kebijakan tersebut bagi kepentingan-kepentingan organisasinya dan pribadinya. Disposisi implementor ini mencakup dua hal yang pertama adalah respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan yang kedua kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan

Program pengembangan UMKM merupakan salah satu bentuk dari implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam menangani UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Dalam pelaksanaannya, agar tercapainya tujuan kegiatan pengembangan UMKM ini, yaitu menjadikan UMKM Kabupaten Kudus yang berdaya saing dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui UMKM, maka perlu dianalisa keefektivitasannya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan UMKM untuk mengetahui apakah sudah berjalan efektif atau belum efektif.

1.5.2.2 Efektivitas

Efektifitas merupakan pencapaian tujuan yang dipandang sebagai tujuan akhir oleh sebuah organisasi, dan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya Steers dalam (Indrawijaya, 2008:46) mengemukakan bahwa efektivitas berupa sejauh mana suatu organisasi dapat melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarnya. Penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian yang umum. Sedangkan Georgopolous dan Tannemaum (dalam Indrawijaya, 2008: 228) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri didalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan”.

Menurut ahli manajemen Peter Drucker efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Sedangkan efesiensi adalah

melakukan pekerjaan dengan benar (*doing the right*). Bagi para manajer, pertanyaan yang paling penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menentukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan, dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan (Handoko, 2008: 7)

Komang Ardana (2009:3) menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis efektivitas yaitu :

1. Efektivitas Individu

Penilaian efektivitas yang didasarkan pada perilaku yang akan mempengaruhi kemampuannya dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi, antara lain: kepribadian, kepuasan dan persepsi

2. Efektivitas Kelompok

Penilaian ini didasarkan pada perilaku individu dalam kelompok. Sejahterama kontribusi individu dalam kelompok-kelompok yang terbentuk dalam organisasi sehingga mempengaruhi pencapaian organisasi.

3. Efektivitas Organisasi

Berkaitan dengan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Katz dan Kahn yang memandang organisasi sebagai sistem terbuka, mulai dengan mendefinisikan efektivitas sebagai “usaha mencapai keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara”. Disini ada dua faktor dasar yang dianggap sangat penting artinya dalam penentuan efektivitas. Pertama, konsep *efesieni* diperkenalkan sebagai faktor-faktor penentu efektivitas yang perlu, tetapi

bukan satu-satunya. Katz dan Khan mendefinisikan efisiensi sebagai perbandingan antara masukan dengan keluaran energi dan mengajukan argumentasi bahwa penyelesaian atau pemecahan ekonomis dan teknis pada masalah organisasi dapat meningkatkan efisiensi. Penyelesaian (pemecahan) demikian membantu terlaksananya transformasi energi secara ekonomis dan dengan demikian membantu organisasi dalam pertumbuhan dan kelangsungannya. Kedua, Katz dan Khan membahas *efektivitas politis* sebagai faktor penentu yang kedua, dan mendefinisikannya sebagai usaha-usaha jangka pendek untuk memaksimalkan keuntungan untuk organisasi melalui transaksi dan pertukaran yang menguntungkan baik dengan para anggota organisasi maupun dengan pihak luar organisasi. “seperti efisiensi, efektivitas politis juga memberikan sumbangan pada daya laba jangka pendek bagi perusahaan dan pada kekuatan pertumbuhan dan kelangsungannya untuk jangka panjang. Efektivitas politis ini juga membantu peningkatan pengendalian terhadap lingkungan organisasi, karena keuntungan jangka pendek dalam transaksi ekstern diperkuat dan dijadikan permanen oleh adanya preseden dan pengakuan yang resmi”. (Richard M. Steers, 1985: 55)

Menurut Steers (1985), pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria seperti : Kualitas, Produktivitas, Adaptasi, Motivasi, Kepuasan, Keluar Masuknya Pekerja, Kemangkiran.

Emitai Etzioni (Indrawijaya, 2010:187) mengemukakan pengukuran efektivitas organisasi mencakup 4 kriteria yaitu :

1. Adaptasi, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara internal untuk menghadapi perubahan eksternal.
2. Integrasi, tingkat kemampuan organisasi mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan organisasi lainnya.
3. Motivasi, keterikatan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Produksi, jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Sedangkan kriteria efektivitas menurut Gibson (1985: 33-35) :

- a. Produktivitas, mencerminkan kemampuan organisasi menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungan.
- b. Efisiensi, mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya oleh organisasi.
- c. Kepuasan ukuran untuk menunjukkan tingkatan organisasi memenuhi kebutuhan karyawan.
- d. Keadaptasian, tingkat ketanggapan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e. Pengembangan, kemampuan organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang serta memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjang.

Steers (1985:8) juga mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu :

1. Karakteristik Organisasi

Terdiri dari struktur yaitu mengenai bagaimana cara orang-orang dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan teknologi merupakan variasi dalam proses mengubah masukan bagi organisasi yang dipakai untuk menunjang tercapainya sasaran organisasi.

2. Karakteristik Lingkungan

Mencakup dua aspek meliputi lingkungan ekstern merupakan semua kekuatan yang timbul di luar batas organisasi dan mempengaruhi kehidupan organisasi misalnya kondisi ekonomi dan peraturan pemerintah serta lingkungan intern merupakan segala hal yang berhubungan dengan iklim organisasi misalnya orientasi pekerja atas imbalan dan hukuman.

3. Karakteristik Pekerja

Berkaitan dengan perbedaan peranan individu yang diberikan bagi tercapainya tujuan organisasi. Setiap individu memiliki kemampuan dan sifat yang berbeda meskipun ditempatkan dalam lingkungan kerja yang sama.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Merupakan penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, menciptakan lingkungan prestasi serta proses-proses komunikasi dengan kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta inovasi dan adaptasi organisasi.

Agar mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan pengembangan UMKM yang dilakukan di Kabupaten Kudus, penelitian ini menggunakan teori efektivitas sebagai dasar pengukuran apakah implementasi kebijakan tentang pelaksanaan pengembangan UMKM sudah tercapai tujuannya. Untuk dapat mengetahui

apakah suatu program sudah tercapai tujuannya maka harus dilihat dari pengukuran efektivitas. Ada beberapa pengukuran efektivitas yang dapat dilihat dari : adaptasi, integrasi, motivasi, produktivitas. Dengan demikian dalam melakukan penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa indikator-indikator yang sudah dijelaskan diatas untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus sudah berjalan efektif atau belum efektif

1.5.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses menyeluruh suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Nugroho, 2007:117)

Pengertian pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan.
2. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan).
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
4. Terjaminnya keamanan.
5. Terjaminnya hak asasi manusia.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan, dengan perkataan lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (1999) (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:47), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Di dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Di dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut persediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasmita, 1996) (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:48)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan menuju pembangunan masyarakat yang muncul karena adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada dilingkungan masyarakat.

Pada penelitian ini pemerintah Kabupaten Kudus melakukan kegiatan pemberdayaan UMKM dengan membuat dan melakukan kegiatan pengembangan UMKM, dengan tujuan agar UMKM yang ada di Kabupaten Kudus mampu berdaya saing dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui UMKM.

1.6. FENOMENA PENELITIAN

Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan pengembangan program usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik atau sebaliknya. Di Kabupaten Kudus sendiri sudah adanya program usaha kecil menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dengan tujuan tercapainya tujuan dari diadakan program UMKM yang memiliki visi “terwujudnya usaha industri, koperasi dan menengah yang mandiri , profesional, berdaya saing dan berwawasan lingkungan”. Fenomena yang akan diteliti oleh peneliti meliputi:

1. Efektivitas pelaksanaan pengembangan program usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan baik dilihat dari :
 - a) Produktivitas

1. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus dalam pengembangan program usaha mikro kecil menengah.
2. Kegiatan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus dalam pendampingan permodalan dan kepengurusan kepemilikan usaha.
3. Kegiatan yang dilakukan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus untuk pengenalan produk umkm di Kabupaten Kudus.

b) Motivasi

1. Terpenuhinya usaha mikro kecil menengah yang berdaya saing melalui kegiatan pengembangan yang diadakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus
2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha mereka bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus.

c) Adaptasi

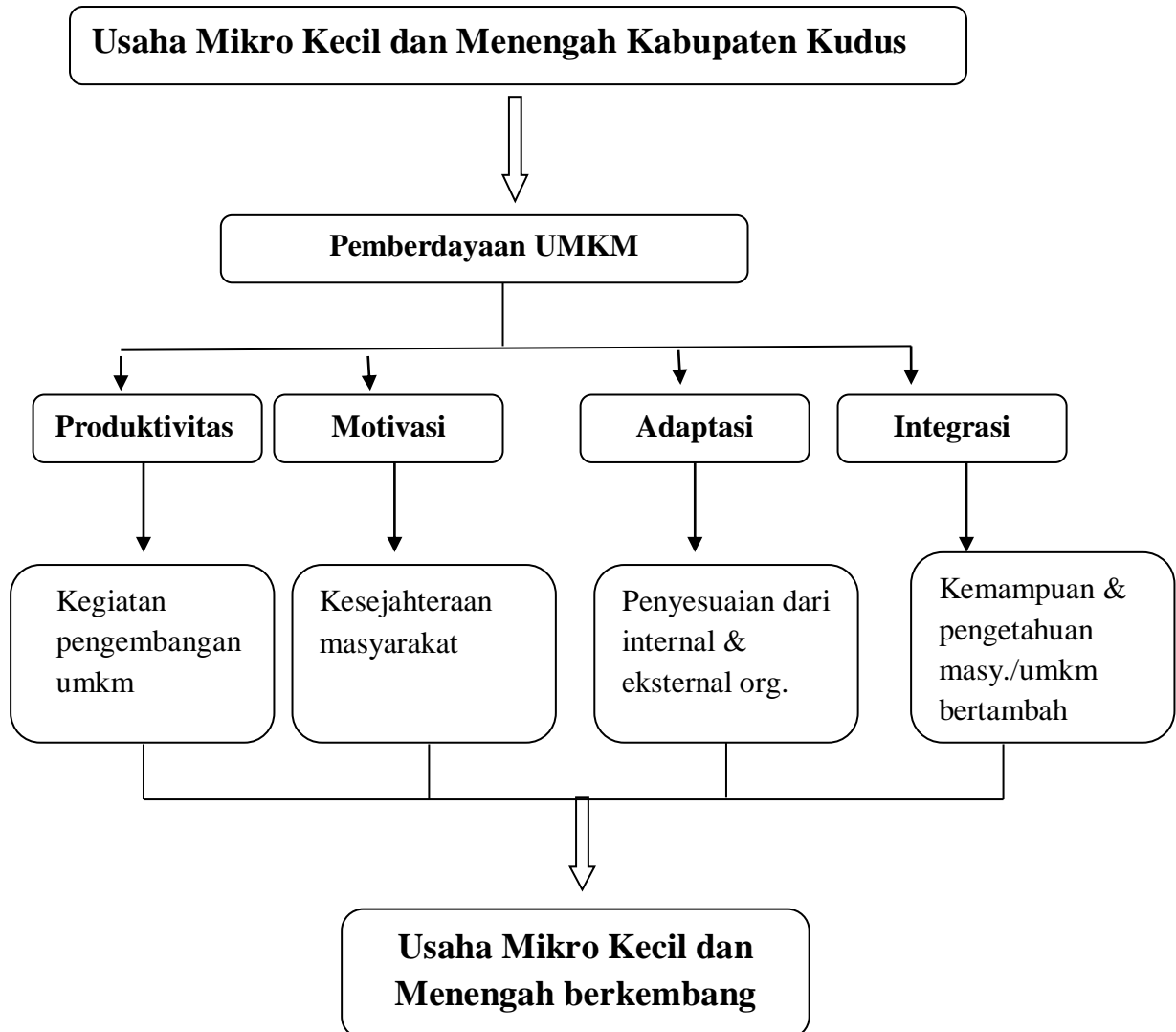
1. Kemampuan pegawai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam menyesuaikan diri dengan peraturan yang sudah ditentukan yang sudah dijelaskan pada Resntra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus.
2. Kemampuan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan

masyarakat akan kebutuhan yang diinginkan terkait UMKM di Kabupaten Kudus.

d) Integrasi

1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus dalam penyampaian informasi dan cara pengenalan kegiatan terkait dengan pengembangan program UMKM yang ada di Kabupaten Kudus.

Kerangka Berpikir :



1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah diskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif dan jenis diskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta fenomena-fenomena menurut pandangan dan definisi partisipan. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara.

1.7.2 Jenis Penelitian

Menurut Singaribun (dalam Machfoedz,2007) membagi perspektif penelitian dengan istilah “Tipe Penelitian” menjadi tiga tipe, yakni:

a. Penelitian Deskriptif (Descriptive)

Merupakan suatu penelitian yang bermaksud memperoleh atau mendapatkan gambaran tentang sifat dari suatu gejala masyarakat. Penelitian diskriptif umumnya untuk mengetahui perkembangan dan frekuensi sarana fisik tertentu.

b. Penelitian Penjajakan (Eksploratif)

Merupakan suatu penelitian yang bertujuan memperdalam pengetahuan mengenai gejala tertentu dengan maksud untuk merumuskan masalah

secara terperinci. Penelitian penjajakan bersifat terbuka, mencari-cari belum memiliki hipotesis.

c. Penelitian Penjelasan (Eksplanatori)

Penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesa tentang hubungan kausalitas variabel yang diteliti dari hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian penjelasan berkaitan dengan hubungan-hubungan variabel-variabel penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik, dengan demikian data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar serta angka-angka yang kemudian dianalisis. Angka-angka tersebut sifatnya hanya sebagai penunjang dalam proses analisis data. Penelitian deskriptif menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (lembaga, masyarakat, daerah), pada saat sekarang, yang mendasarkan faktor-faktor yang nampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu, misalnya interaksi sosial, sistem kekerabatan dan lain-lain.

1.7.3 Fokus dan Lokus Penelitian

a. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan pengembangan program usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kudus.

b. Lokus Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja, Prindustrian dan UKM di Kabupaten Kudus.

1.7.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada kepala seksi pengembangan SDM dan teknologi di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, baik dari tinjauan pustaka maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara (*interview*).

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan, yaitu informan yang akan diwawancarai yakni Kepala Bidang Koperasi dan Kepala Seksi Sumberdaya dan Teknologi bidang Koperasi dan UKM. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kegiatan atau upaya apa saja

yang dapat mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kudus.

Identitas Informan, Sumber informan dalam penelitian ini adalah informan yang dinilai memiliki kompetensi untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informasi yang didapatkan dari informan adalah berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai permasalahan yang ingin disajikan dalam bentuk penjelasan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tiga orang informan yaitu : 1. Drs. Abi Wibowo sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UKM. 2. Mahmudah W, SH sebagai Kepala Seksi Pengembangan Promosi, Produksi Dan Pembiayaan UKM. 3. Rofiq Fahri, SH.ME sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi UKM.

2. Teknik Dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang didapatkan untuk melakukan penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara kepada pihak dinas dan data yang diberikan oleh dinas terkait dengan data kegiatan yang menunjukkan mampu memberikan dampak yang baik bagi pelaku dan usaha umkm di Kudus.

1.7.6 Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Spradley, yaitu model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh James Spradley pada tahun 1980. Spradley mengemukakan dalam analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu, Domain, Taksonomi, Komponensial. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Analisis Domain

Analisis Domain dalam penjelasan Sugiyono (2012: 256) dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. Hasilnya adalah gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

2. Analisis Taksonomi

Analisis Taksonomi (*Taxonomy Analysis*). Pada tahap analisis taksonomi, peneliti berupaya memahami *domain-domain* tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain, dan dari sub-domain itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa, alias habis (*exhausted*). Pada tahap analisis ini peneliti bisa mendalami domain dan sub-domain yang penting lewat konsultasi

dengan bahan-bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman lebih dalam.

3. Analisis Komponensial

Menurut Sugiyono (2012:264), pada Analisis Komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan adalah perbedaan dalam domain atau kesenjangan yang kontras dalam domain. Data ini dicari melalui observasi, wawancara lanjutan, atau dokumentasi terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

1.7.7 Validitas Data

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330).